

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Asmarawati, Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2014.
- Coopers, Price Water House. *Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure*. United Kingdom: PricewaterhouseCoopers LLP, 2009. <https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/insolvency-in-brief.pdf>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, dan Julia Arnscheidt. *Kajian Socio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012. <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2915491/view>.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Memahami Untuk Membasmi: Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi>
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: SAGE Publications, Inc., 2014. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-DataAnalysis.pdf>.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal

Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021): 56–65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

Hamamah, Fatin, dan Heru Hari Bachtiar. “Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *CENDEKIA Jaya* 1, no. 2 (2019): 73–98. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>.

Herman, KMS., Faisal Santiago, dan Bambang Bernanthos. “Rekonseptualisasi Tindak Pidana Pajak Yang Merugikan Keuangan Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Lex Publica* V, no. 2 (2018): 23–30. <https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/92.%0A>.

Hutama, Wisnu Nanda, dan Dewi Gunawati. “Implementation of the Confiscation and Auction of Assets Convicted in the Jiwasraya Corruption Case to Recover State Losses.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 11, no. 3 (2024): 470–77. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5744>.

Istiqomah, Arini Nova, Yasmine Amira Uzhma, dan Syifa Fadilah. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 287–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1596>.

Johari, dan Teuku Yudi Afrizal. “The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia.” *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.141>.

Jonathan, Michael, dan Wilma Silalahi. “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Konseptual Dan Implementasi.” *EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 31–40. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.8825>.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas

Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Credipo* 01, no. 01 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Levinthal, Louis Edward. “The Early History of Bankruptcy Law.” *University of Pennsylvania Law Review* 66, no. 5/6 (1918): 223–50. https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7663&context=penn_law_review.

Meidiantama, Refi, and Donna Exsanti Charinda. “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional (Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code).” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)* 3, no. 1 (2024): 15–24. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>.

Nola, Luthvi Febryka. “Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2018): 217–34. <https://doi.org/doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047>.

Putri, Dina Desvita Pramesti. “Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 2 (2024): 302–19.

Sawung, Dimas Akbar, Fariska Jihan Setiyowati, dan Mila Yusnika. “Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam Kuhp Nasional.” *Suara Keadilan* 24, no. 1 (2023): 20–27. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11268>.

Wardhana, Daniar Rasyid Setya, Dicky Andi Firmansyah, Er Handaya Artha Wijaya, and Yugo Susandi. “Wewenang Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap” *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (2020): 251–63. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14309>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi *jo.* Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Fairuz, Anisa Isma. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kedai Sianam Tahun Ajaran 2018 (Studi Kasus Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn).” Universitas Medan Area, 2023. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21887>.

Nugroho, Raditya Rizki. “Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam

Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025. [https://repository.unissula.ac.id/39941/1/Magister Kenotariatan_21302300111_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/39941/1/Magister%20Kenotariatan_21302300111_fullpdf.pdf).

Triyanto, Toni. “Rekonstruksi Regulasi Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024. [https://repository.unissula.ac.id/35212/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100181_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/35212/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302100181_fullpdf.pdf).

Ensiklopedia/Kamus

Black, Henry Campbell, Joseph R. Nolan, and Michael J. Connolly. *Black's Law Dictionary*. United States of America: West Publishing Company, 1979.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.